ABDEE IQBAL

Stasiun Lempuyangan

FESTIVAL

Tragedi Tugu Teknik

Pengenalan Teknik untuk Maba (Platinum) Fakultas Teknik (FT) Universitas Gadjah Mada, 24-26 Agustus 2006, berakhir ricuh. Masalah dalam kepanitiaan menjadi pemicunya.

MALAM ITU, SELEPAS ACARA PENUTUPAN PLATINUM, LIMA belas anggota tim Tata Tertib (Tatib) beristirahat di sekitar tugu FT. Tiba-tiba, sekira dua ratus orang datang menyerang. Massa, sebutan sekelompok penyerang tadi, mencari koordinator Tatib, Dwinda Suryo W. serta Haekal dan Ateng, anggota Tatib. Namun, hanya Ateng yang berada di lokasi. Ia pun langsung dihantam massa. Sepuluh laki-laki anggota Tatib lainnya berusaha melindungi Ateng. Namun, mereka turut menjadi korban pemukulan. "Satuan Keamanan Kampus (SKK) yang ada saat kejadian tidak bertindak," ujar Rangga, anggota Tatib. Alhasil, Ateng terluka parah dan harus dilarikan ke *Intensive Care Unit* (ICU).

Narasumber *balkon* yang tidak ingin disebut namanya menerangkan, tujuan massa ke FT untuk memperjuangkan keadilan. "Jika ada yang bersalah, ia harus dihukum," ujarnya. Massa bermaksud mengadili pelaku pemukulan Arief Rahman P., Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FT. Menurutnya, massa dikoordinir melalui sms berantai. Namun, mereka datang atas nama pribadi, bukan organisasi. Awalnya, massa hanya mencari pelaku. Namun, saat Tatib dikumpulkan, mereka memberontak hingga seorang anggota massa terluka.

Arief menyatakan, ada keterkaitan antara penyerangan dengan masalah yang terjadi dalam kepanitiaan. Hal tersebut ada sejak hari pertama Platinum. Dewan Pengawas Ospek (DPO) menilai, pemberian sanksi Tatib pada mahasiswa baru melanggar aturan. Pihak Tatib mendapat Surat Peringatan (SP) I. "Keputusan pemberian SP ini tanpa ada sidang dengan DPO dan pihak-pihak lain yang terlibat," ujar Uyok, panggilan akrab koordinator Tatib. Hal ini menyebabkan terjadinya pemukulan ketua mahkamah, koordinator pemandu dan koordinator lapangan oleh Tatib.

Sore, di hari kedua Platinum, Uyok dipanggil ketua *Organizing Committee* (OC), Antaria Dwi Nugroho untuk menemui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Uyok dikritik mengenai acara Platinum. Salah satunya masalah waktu yang seharusnya selesai pukul empat. Uyok menilai masalah yang dikritik MPM bukan otoritasnya. Rahajeng Titisari selaku anggota bidang acara angkat bicara, "masalah waktu sudah dibicarakan dengan Wakil Dekan (Wadek) III. Kesepakatan yang dicapai, acara berlangsung pukul 06.00 sampai 17.00 WIB". Suasana kepanitiaan pun memanas, disusul pemukulan Antaria oleh Uyok.

Malam harinya, diadakan rapat yang memutuskan masalah pemukulan terhadap Antaria dianggap selesai. Namun, Uyok dipecat lewat SP III. Anggota tim Tatib lainnya menyatakan akan mengundurkan diri jika Uyok dipecat. Menanggapi masalah ini, SP III dicabut dengan harapan Platinum berjalan lancar. Namun, satu jam kemudian SP III kembali dikeluarkan. Koordinator Tatib kecewa dan memukul Arief. "Pemukulan ini telah melecehkan BEM," ujar Arief.

Di hari terakhir Platinum, diselenggarakan pertemuan antara dekanat dan panitia yang memutuskan bahwa tim Tatib tetap ada sampai Platinum selesai. Seusai acara, tragedi kekerasan kembali terjadi. Tatib diserbu ratusan massa. Menurut Arief, massa mengatasnamakan 'Solidaritas untuk BEM' meskipun ia mengakui tidak tahu asal-usul mereka.

Dekan FT, Prof. Dr. Ir. Indarto, D.E.A mengatakan, penyerangan terjadi karena kurangnya koordinasi dalam tubuh panitia. Kamis (7/9), dekanat mengadakan rapat dengar pendapat, dicapailah kesepakatan untuk menghentikan pengusutan masalah. Ia menghimbau pihak-pihak yang terlibat tidak termakan isu provokatif, sehingga peristiwa yang sama kelak tidak terjadi lagi. **[Nuraini]**

Ketika kualitas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dipertanyakan, mampukah kurikulum baru menjawab tantangan?

Memberi Panduan, Menuju Perubahan

ABDEE .BAL

SAAT INI, HAMPIR SELURUH FAKULTAS DI UGM mulai memberlakukan kurikulum baru, kurikulum 2006. Kurikulum ini berorientasi pada sistem *Student Centered Learning* (SCL), sistem yang memusatkan pembelajaran pada mahasiswa. Pemberlakuan SCL dilatarbelakangi kesadaran UGM pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), perubahan zaman, dan keinginan memenuhi standar kompetensi di dunia kerja. "UGM ada jaminan mutunya, namun selama ini indeks prestasi mahasiswa belum menggambarkan kompetensinya," ujar Djoko Dwiyanto, Sekretaris Pusat Pengembangan Pendidikan (P3).

Bukan kali pertama UGM melakukan perubahan kurikulum. Tiap empat tahun, hal ini dilakukan. Pasalnya, dalam jangka waktu empat tahun dapat diketahui ada tidaknya peningkatan kualitas lulusan UGM. "Jadi, setelah mereka lulus kita bisa melakukan evaluasi," tutur Djoko Dwiyanto.

Perubahan kurikulum dimulai saat P3, tim perancang kurikulum, memperoleh instruksi dari Wakil Rektor Senior Bidang Akademik untuk menyusun rancangan kurikulum baru. Rancangan tersebut disetujui oleh Senat Akademik. Selanjutnya, pada 26 Januari 2006 dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 22/P/SK/HT/2006 tentang panduan penyusunan kurikulum 2006 untuk program studi jenjang sarjana di UGM. Status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang dimiliki UGM, memungkinkannya untuk menerapkan perubahan kurikulum tanpa perlu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

Namun, ketetapan yang diatur dalam SK tersebut tidak bersifat otoriter. "Jadi, tidak mutlak setiap fakultas harus melakukan perubahan kurikulum," ungkap Djoko Dwiyanto. UGM memberikan otonomi kepada fakultas untuk mengikuti panduan perubahan kurikulum atau tetap memberlakukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum lama fakultas dapat tetap diberlakukan, namun harus mengoptimalkan modifikasi aspek materi, cara pembelajaran, dan cara penilaian. Misalnya, cara pembelajaran yang tadinya berupa komunikasi searah dari

dosen ke mahasiswa, diubah menjadi dua arah. Diskusi kelas yang menuntut mahasiswa lebih aktif dalam proses perkuliahan adalah salah satu bentuk realisasinya. Selain itu, fakultas bertanggung jawab melakukan sosialisasi pada mahasiswa. Sedangkan P3 hanya berkewajiban menyosialisasikan perubahan kurikulum dan memberi panduan pada seluruh fakultas.

Di Fakultas Peternakan (FPT), perubahan kurikulum telah direncanakan sejak tahun 2000. Pertimbangan ini berdasarkan masukan dari alumni, Forum Komunikasi Pemimpin Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FKPPTPI), dan *stake holder* yang mengatakan bahwa lulusan UGM kurang kompetitif dalam dunia kerja.

Perubahan kurikulum berimbas pada perampingan program studi (prodi) di FPT. Sebelumnya ada empat prodi, namun kini hanya satu, yaitu Ilmu dan Industri Peternakan. Menurut Prof. Dr. Ir. Tri Yuwanta, S.U., DEA, Dekan FPT, perampingan terjadi karena FPT dipandang sebagai industri. Dampak lain, jumlah laboratorium berkurang dari 14 menjadi 13. Selain itu, di FPT terdapat mata kuliah yang digabung karena mengandung muatan materi yang sama.

Menyoal sosialisasi, pihak fakultas telah melakukannya secara intern di kalangan dosen, karyawan, dan mahasiswa sejak April 2006. Sedangkan sosialisasi ke luar fakultas, seperti Dirjen Dikti, instansi lain yang terkait masalah peternakan, serta orang tua mahasiswa telah dilakukan mulai 2 Mei 2006.

Perubahan kurikulum juga dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). "Kurikulum baru dirancang sebagai respon atas kebutuhan pasar lulusan UGM," tutur Dr. Purwo Santoso, M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik Fisipol. Menurutnya, mata kuliah yang menurut logika fakultas sudah tidak sesuai tuntutan pasar dapat dihapus.

Purwo Santoso pun menjelaskan tentang sosialisasi yang menurutnya tidak terlalu rumit. "Mahasiswa baru tidak ada masalah, paling angkatan 2005 ke atas. Saya rasa tidak ada kendala yang berarti. Nyatanya, belum ada keluhan yang datang ke saya," tegasnya.

Perubahan tersebut mendapat respon, meski hanya berupa selentingan di kalangan mahasiswa. Misalnya, mengenai buku panduan akademik yang masih memuat kurikulum lama dan timbulnya rasa iri mahasiswa angkatan sebelumnya. "Angkatanku harus ambil delapan mata kuliah wajib fakultas, tapi mahasiswa angkatan 2006 hanya perlu ambil lima mata kuliah wajib," ungkap Acni, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2005. Menjawab hal tersebut, Purwo Santoso menyatakan, itu adalah resiko pembaruan. Perubahan kurikulum di Fisipol juga menyebabkan rencana penggantian nama Jurusan Administrasi Negara menjadi Kebijakan dan Manajemen Publik. Menurut Purwo Santoso, hal ini dilakukan karena nama itu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman.

Perubahan kurikulum juga dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Menurut Dekan FMIPA, Prof. Drs. H. Subanar, Ph.D, perubahan kurikulum perlu dilakukan untuk menambah kemampuan bersaing di tingkat global. Kurikulum baru saat ini dinilai lebih menekankan fleksibilitas, sehingga jumlah mata kuliah wajib dapat berkurang. Perubahan kurikulum yang sudah dirancang sejak tahun 2005 ini, memunculkan desas-desus perubahan nama Prodi Elektronika dan Instrumentasi (Elins). Merespon itu, Subanar menjelaskan bahwa Elins dan Prodi Ilmu Komputer (Ilkom) sedang dalam proses menjadi jurusan. Hal itu dikarenakan kedua prodi tersebut memiliki substansi materi kuliah yang sama. "Ini juga dalam rangka efisiensi," tegasnya.

Mengenai rencana itu, Subanar menuturkan bahwa mahasiswa sudah tahu karena telah dilibatkan dalam perancangan perubahan kurikulum sejak awal. "Bahkan, mereka ikut memberi masukan dalam rancangan kurikulum baru ini bersama alumni dan himpunan profesi," terangnya bangga.

Berbeda dengan fakultas-fakultas yang disebutkan di atas, Fakultas Filsafat dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) belum menerapkan kurikulum baru. Fakultas Filsafat masih memberlakukan kurikulum 2005. Menurut Dr. Abbas Hamimi Mintaredja, Dekan Fakultas Filsafat, pihaknya baru satu tahun menerapkan kurikulum 2005 yang memiliki esensi sama dengan kurikulum 2006.

Alasan ketidaksiapan, menyebabkan FIB belum menerapkan kurikulum 2006. Fakultas ini tidak mau tergesa-gesa. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sumber daya manusia yang belum siap, baik dosen, mahasiswa, maupun pegawai. Faktor lain adalah masalah infrastruktur, seperti perpustakaan dan hal teknis lainnya, seperti pemberian nama mata kuliah baru. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik FIB, Bambang Purwanto, fakultasnya akan memberlakukan kurikulum baru di tahun 2007 dan mahasiswa pun telah mengetahui rencana ini. "Kurikulum baru nanti hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru angkatan 2007," tambahnya. Di lain pihak, bila mahasiswa lama ingin menggunakan kurikulum 2007, maka fakultas akan memfasilitasinya.

[Wiwi, Novi]

Ralat Balkon Edisi Khusus 2006:

Pada halaman 7 dan 27 tertulis PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasionalis Demokrat), dan FMN (Front Mahasiswa Nasionalis).
Seharusnya tertulis PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), dan FMN (Front Mahasiswa Nasional)
Pada halaman 7, dalam Tabel Pemetaan Gerakan Mahasiswa (Ekstra Kampus) di Jogjakarta tertulis paradigma gerakan Front Mahasiswa Nasional (FMN) adalah demokrasi kerakyatan.
Seharusnya tertulis paradigma gerakan Front Mahasiswa Nasional (FMN) adalah demokrasi nasional.

Pada halaman 26, tertulis ...Ignatius Dwiyana, Sekjen Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI).
Seharusnya tertulis ...Ignatius Dwiyana, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Ketika Kurikulum Baru Diterapkan

Tahun Ajaran (TA) 2006/2007, beberapa fakultas menerapkan kurikulum baru. Reaksi beragam datang dari kalangan mahasiswa.

TA BARU IDENTIK DENGAN MASUKNYA MAHASISWA baru ke dalam lingkungan kampus. Minggu pertama dan kedua awal semester, mahasiswa disibukkan dengan pengisian dan perubahan Kartu Rencana Studi (KRS). Namun, pada TA 2006/2007 ini, kesibukan tersebut terasa sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa fakultas di UGM serempak melakukan perubahan kurikulum.

Perubahan ini jelas membuat sebagian mahasiswa bingung. Alasannya karena ada penghapusan, penambahan, dan pemadatan beberapa mata kuliah. Reaksi beragam pun datang dari kalangan mahasiswa.

"Angkatan atas merasa dirugikan, karena mata kuliah yang akan diulang tidak ditawarkan lagi", ungkap Tia, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2003. Hal tersebut diamini oleh Helen, teman seangkatannya. Mereka juga menyesalkan tidak adanya sosialisasi, sehingga mahasiswa tidak bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan kurikulum ini.

Secara umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) melakukan perubahan kurikulum dengan pemadatan mata kuliah. Pengantar Ekonomi Indonesia, Pengantar Sosiologi, Pengantar Hukum Indonesia, Dasar-Dasar Logika, Pengantar Antropologi Sosial digabung menjadi Ilmu Sosial Dasar. Perubahan kurikulum yang lain diserahkan ke jurusan masing-masing.

Semua jurusan di Fisipol mengadakan perubahan kurikulum. Namun diantara enam jurusan, Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) yang melakukan perubahan secara mendasar. "Proses penyusunan kurikulum baru sudah dimulai sejak dua tahun lalu," ungkap AAGN Ari Dwipayana, S.IP, M.Si, ketua tim perubahan kurikulum JIP. Ide ini muncul karena kurikulum lama dinilai tidak bisa memenuhi perkembangan ilmu. Mahasiswa pun kesulitan memilih minat studi dari awal. Kurikulum baru JIP memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Mulai TA ini, JIP menawarkan tiga konsentrasi, antara lain Negara, Politik Kepartaian dan Perwakilan, serta Masyarakat.

Untuk menyosialisasikan kurikulum baru, serangkaian *workshop* dilaksanakan dengan melibatkan staf pengajar dan mahasiswa. Selain itu, JIP juga menerbitkan buku panduan kurikulum baru "JIP 2006".

Serangkaian kegiatan telah dilakukan dalam rangka sosialisasi kurikulum baru. Namun, tetap saja muncul keluhan di kalangan mahasiswa. "Kami merasa dirugikan karena sudah separo jalan," tutur Dewi Nurul M., mahasiswa JIP 2004. Banyak mahasiswa lama merasa kesulitan jika ingin mengulang mata kuliah. Menanggapi hal ini, pihak jurusan tidak tinggal diam. Mereka memberi beberapa solusi. Pertama, tetap mengulang dengan konsekuensi mengikuti mata kuliah baru yang ditawarkan. Kedua, mengambil mata kuliah lain dengan materi serupa yang diasumsikan sebagai pengganti mata kuliah yang rencananya diulang.

Namun, menurut Dewi, perubahan kurikulum juga memberikan keuntungan. Beberapa mata kuliah yang ditawarkan lebih aplikatif dengan perkembangan zaman. "Contohnya, mata kuliah Manajemen Krisis, mempelajari cara mengatasi krisis, tepat sekali dengan keadaan Indonesia saat ini," tambahnya.

Tidak jauh berbeda dengan Fisipol, perubahan kurikulum juga terjadi di Fakultas Teknik. Di fakultas ini hanya enam jurusan saja yang sudah mengajukan penyempurnaan kurikulum baru 2006. "Pengajuan penyempurnaan kurikulum tersebut telah dibahas oleh Komisi I Fakultas Teknik di tingkat senat fakultas," ungkap Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,Msc.,Ph.D, Wakil Dekan Bidang Akademik. Hal ini telah disetujui di tingkat rapat pleno senat yang kemudian diproses di senat universitas.

Jurusan yang telah melakukan penyempurnaan kurikulum adalah Teknik Fisika, Teknik Kimia, Teknik Geodesi, Teknik Industri, Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Jurusan-jurusan lain yang belum melakukan evalusi mengenai mata kuliah TA sebelumnya, memilih tidak mengajukan perubahan kurikulum.

"Sisi positif bagi jurusan yang memberlakukan perubahan kurikulum yaitu dapat menyempurnakan metode penyampaian perkuliahan dan mempersingkat masa studi," jelas Bambang. Misalnya saja, di jurusan Teknik Sipil dikenal istilah 3+1 (*three plus one*). Maksudnya, mahasiswa Teknik Sipil diharuskan mengambil mata kuliah inter jurusan selama tiga tahun. Satu tahun sisanya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah antar jurusan, bahkan antar fakultas.

Pernyataan Bambang tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Sigit, mahasiswa Teknik Geodesi 2004. Menurut

Sigit, dengan adanya kebijakan baru ini, butuh waktu lima tahun untuk mencapai gelar sarjana. "Tadinya, gelar sarjana dapat dicapai dalam kurun waktu empat tahun, namun setelah berlakunya kebijakan ini menjadi lima tahun," imbuh Sigit. Alasannya, ada beberapa mata kuliah yang jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) nya diringkas atau dipotong, Misalnya, mata kuliah Matematika Geodesi TA sebelumnya berbobot 3 SKS, namun sekarang menjadi 2 SKS. Alasan lainnya, tidak hanya bobot SKS mata kuliah yang diringkas, namun ada juga praktikum yang dihilangkan karena alat-alat praktikum tidak tersedia.

Mengatasi konversi yang terjadi di Fakultas Teknik, yaitu pemotongan bahkan penghapusan mata kuliah, fakultas memberi tawaran solusi. "Mata kuliah yang tidak ditawarkan lagi pada semester ini, dapat diganti dengan mata kuliah yang silabusnya serupa," jelas Bambang.

Berbeda dengan Sigit yang tidak mendukung kurikulum baru, Bagus Sunar Woko, mahasiswa Teknik Industri 2004, menyambut positif kebijakan baru ini. Alasannya, mata kuliah yang berlaku di TA sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. "Mata kuliah yang ditawarkan sekarang sesuai dengan pasar yang dibutuhkan oleh Teknik Industri," jelas Bagus.

Tidak berbeda jauh dengan fakultas lain, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) juga memberlakukan kurikulum baru pada semester ini. Latar belakang perubahan kurikulum ini karena perkembangan zaman, sehingga harus membuat mata kuliah yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. "Perubahannya mencakup komposisi mata kuliah, pengkodean, urutan mata kuliah sampai metode penyampaian," jelas DR. Ir. Djagal W. Marseno, M.Agr, Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penelitian.

Kebijakan ini mendapat respon negatif dari mahasiswa. Salah satunya Yani, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 2003. "Kurikulum baru ini membuat pilihan mata kuliah menjadi berkurang, sehingga bingung memilih mata kuliah apa," jelasnya. Menanggapi masalah ini, pihak fakultas memberi solusi dengan mengadakan kelas khusus bagi mahasiswa yang akan lulus. Mahasiswa yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan untuk diadakan kelas.

Berbeda dengan fakultas lain yang sebagian besar perubahannya hanya mencakup mata kuliah, Fakultas Peternakan (FPT) mengadakan perubahan yang lebih signifikan (lihat Laput 1). Awalnya, fakultas ini memiliki empat program studi yaitu Nutrisi, Makanan Ternak, Produksi Ternak, dan Sosial Ekonomi Peternakan. Keempat program studi ini disatukan menjadi Ilmu dan Industri Peternakan. "Pertimbangan melakukan penggabungan jurusan karena hasil evaluasi 10 tahun yang mengecewakan. Kalau sifatnya generalis, lulusan dapat mendaftar kemana saja," jelas Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penelitian, Dr. Ir. Zuprizal, DEA.

Bagi mahasiswa FPT, perubahan ini tidak terlalu berpengaruh. "Saya pribadi tidak masalah dengan perubahan kurikulum ini," tutur Nuri Pratiwi, mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak 2004. Respon setuju juga disampaikan Yuzaki, mahasiswa Produksi Ternak 2003. Menurutnya, kurikulum baru memberi sisi positif karena mahasiswa FPT bisa mendapatkan mata kuliah jurusan lain. **[Adhif, Nora]**

Membaca Trinitas, Sebuah Konstruksi Paradigma

"Teori Relativitas dan Teori Pasar Bebas merupakan salah satu 'takhayul' iptek yang hingga kini masih disanjung-sanjung"

HAL ITULAH YANG DILONTARKAN DR. IR. HIDAYAT nataatmadja dalam sebuah seminar 'Dari Relativitas Hingga Atomos Berpikir' hari Sabtu, 16 September 2006. Seminar yang dilaksanakan di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM ini menyita perhatian peserta. Mereka terlihat antusias, walaupun tak sedikit yang terlihat bingung saat menyimak cara baru dalam memandang eksistensi ilmu pengetahuan.

Diskusi yang dimulai pukul 09.30 WIB ini mengusung dialog tentang bagaimana keluar dari nihilisme tanpa terjebak pada dogmatisme ilmu dan agama. Pembicaraan mengalir seputar keterkaitan masalah trinitas; agama, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hidayat kemudian memberikan contoh tentang Teori Relativitas mengenai perbedaan waktu dan kecepatan suatu benda yang berbeda-beda menurut pengamat A dan pengamat B yang jaraknya terpisah. Menurut teori tersebut, perbedaan pendapat mengenai waktu dan kecepatan oleh kedua pengamat adalah wajar. Hal itu tidak bisa disalahkan, atau dengan kata lain keduanya benar dan tidak menyalahi aturan.

Menurut Hidayat, teori ini seakan-akan menyatakan tidak ada kepastian mutlak di dunia ini. Semuanya serba relatif. Padahal menurut ajaran agama Islam, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan penuh kepastian antara kadar kebenaran dan ketidakbenarannya. Teori Relativitas menyebabkan kebenaran tidak mutlak, padahal Tuhan adalah kebenaran yang mutlak.

Satu lagi yang menjadi permasalahan yakni tentang istilah globalisasi dan era pasar bebas. Menurutnya, pasar bebas merupakan salah satu takhayul yang paling dipercaya saat ini, sehingga setiap investor bebas berkeliaran dimana pun dan mencaplok sendi-sendi ekonomi orang lain. Istilah yang tepat adalah 'pasar bersaing sempurna'. Setiap orang bebas melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan hak dan kewajiban yang sama. Begitu pula dengan globalisasi. Hidayat sangat tidak menyetujui konsep tersebut karena dianggap sebagai kata lain dari 'Neo-Nasionalisme Amerika'.

Sementara itu, tradisi ilmu pengetahuan di Indonesia kian memprihatinkan dan miskin pengembangan kritik teori. Menurut Hidayat, kelemahan kita yang paling mendasar yaitu enggan melakukan *Theory Building*. Bangsa kita pun lebih dikenal sebagai pemakai sebuah produk yang bernama iptek, bukan sebagai penyumbangnya.

Hidayat Nataatmadja sebenarnya tokoh lama yang banyak menelurkan ide dan gagasannya di dunia ilmu pengetahuan. Namun, pemikirannya jarang muncul karena bahasa yang digunakan Hidayat tidak lazim bagi orang awam. Untuk mengerti dan memahami gagasannya memang dibutuhkan pemikiran kritis dengan intelektualitas yang tinggi.

Seminar yang diadakan oleh Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) UGM Balairung ini juga mengundang Prof. Dr. Damardjati Supadjar sebagai pembicara kedua. Semakin siang diskusi berjalan lamban, mengingat materi yang ditawarkan termasuk masalah yang tidak umum dibicarakan oleh orang awam. Pada akhirnya, semoga kelak bangsa kita tak hanya mengonsumsi ilmu pengetahuan saja, tapi lebih pada proses pengolahan yang terus menerus. **[Pandu]**

Dicari Pemimpi(n) Indonesia yang Bernyali

Judul Buku	: Inilah Presiden Radikal!
Pengarang	: Eko Prasetyo
Penerbit	: Resist Book
Tebal Buku	: i-xii, 159 halaman, 14x21 cm

Pemimpin bernyali tak hanya dalam mimpi. Ahmadinejad, Castro, Chavez, dan Moralez adalah sosok pemimpin yang masih bernyali menghadapi dominasi kaum kapitalis.

KEKUASAAN AMERIKA SERIKAT (AS) LAYAK untuk dilawan. Ucapan ini bukan sekadar bualan. Berulangkali AS bertindak egois untuk mengamankan kepentingannya. Tak jarang, ia melangkahi kedaulatan suatu negara untuk memuluskan keinginannya. Bahkan, bantuan yang diberikan tak lepas dari memelihara kepentingan dan meraup laba setinggi-tingginya.

Sebut saja kasus Turki, negara pertama yang menyediakan wilayahnya dipakai untuk pangkalan militer saat AS melancarkan kampanye antiterorisme. Sebagai gantinya, negara yang pernah dijuluki *Sickman of Asia* ini mendapat pinjaman sebesar $ 15 Miliar (halaman 48-49). Tak hanya itu, AS tak sungkan lagi menginvasi negara yang tak mau tunduk pada kemauannya, seperti Irak, Vietnam, dan Afghanistan.

Namun, kekuasaan itu bukanlah tanpa lawan. Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran, bertahan dengan proyek pembangunan uraniumnya daripada menerima insentif perdagangan yang jauh lebih menguntungkan. Iran ingin menjadi bangsa mandiri dan tak selalu patuh pada masyarakat internasional. Hugo Chavez, Presiden Venezuela, berjuang dengan menaikkan subsidi dan memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Fidel Castro bersama Chavez membentuk *Alternative Bolivarian for Latin Amerika* (ALBA) untuk melawan arogansi pasar bebas. Prinsip saling melengkapi (daripada berkompetisi), solidaritas (daripada dominasi), kerja sama (daripada eksploitasi), dan penghormatan pada hak rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) menjadi senjata utama. Evo Moralez dari Bolivia melakukan kebijakan nasionalisasi atas sejumlah perusahaan gas alam. Sebuah kebijakan yang diharamkan oleh kaum kapitalis. Keempat presiden yang masih berkuasa ini punya kesamaan, menolak taktik licik perdagangan bebas AS.

Mungkin hal ini yang tidak dimiliki para pemimpin Indonesia. Sebuah nyali untuk memenangkan kepentingan rakyat. Nyali para pemimpin radikal itu dibentuk oleh gagasan besar menyejahterakan rakyat. Sedangkan nyali pemimpin kita menggelembung dipersolek media. Jejak pikiran dan prestasi mereka pun hampir sulit dilacak. Nyali artifisial ini akan menciut ketika berhadapan dengan kapitalisme global. Cukup sulit mengharap pemimpin yang bernyali jika kehormatan sebagai bangsa berdaulat hampir tidak ada. Kita diam saja saat AS dan Australia menyoal pengadilan Abu Bakar Ba'asyir terkait isu terorisme. Pun saat presiden AS berkunjung ke Indonesia dengan membawa pengawalan super ketat, kita hanya bisa maklum. Hal itu seakan menegaskan bangsa ini tak mampu menjaga keselamatan tamu dari negara lain.

Sekali lagi, Eko Prasetyo menelurkan kegelisahan itu lewat sebuah buku. Setelah seri Awas Orang Miskin Dilarang (sakit, sekolah, tanpa subsidi) dan Awas Penguasa Tipu Rakyat, kini ia hadir lewat Inilah Presiden Radikal. Gaya bahasa menohok tetap menjadi ciri khasnya. Sayangnya, banyak ejaan salah dan kalimat yang berputar-putar mengganggu kenikmatan membaca. Yang cukup fatal, tulisan pada bab pengantar belum selesai tercetak (halaman 18). Terlepas dari itu, buku ini dapat menjadi semacam oase bagi gerakan-gerakan sosial yang kekeringan gagasan dan imajinasi. Perpaduan pendekatan teoretis dan temuan-temuan kontemporer menjadi poin tersendiri. Karena itu, buku ini 'wajib' dibaca mereka yang mengaku aktivis gerakan sosial. Untuk mereka yang berseberangan dengan ide-ide gerakan sosial, buku ini juga patut diperhitungkan. Ulasan dan analisis fakta di dalamnya dapat dijadikan bahan dialektika ideologi. Sebab, percayalah jika hanya 'menggonggong' anjing pun bisa. Baca dan Lawan! **[abdee]**

IFA.BAL

Bersetia dengan Gamelan

'Sekadar ingin tahu' bukan kalimat yang ada dalam kamus hidup Ishida Noriko, seorang Jepang tulen pecinta gamelan. Segala yang menarik minatnya, termasuk gamelan akan ditelaah sampai tuntas.

DI BALIK WAJAH ORIENTALNYA, TERNYATA Ishida Noriko mahir memainkan gamelan, alat musik tradisional Jawa. Perjumpaannya dengan gamelan dilatarbelakangi kecintaan pada musik sedari kecil, meski ia bukan berasal dari keluarga pemusik. Bagi Ishida-san, begitu ia biasa dipanggil, bermain musik adalah caranya mengungkapkan kebahagiaan.

Kecintaan pada musik membawanya melanjutkan studi di Tokyo National University of Fine Arts and Musicology hingga meraih gelar master. Di universitas tersebut, sekitar awal 1980-an, ia mengambil kelas gamelan. Mulanya, Ishida sekadar ingin memainkan gamelan, namun keunikan gamelan berhasil memikatnya. "Gamelan, berbeda dengan alat musik lain," ungkap Ishida menyatakan keunikan gamelan. Menurutnya, hal terpenting adalah reaksi tabuhan ketika berada di hadapan penonton. "Kalau berhasil, permainan akan bagus," ujarnya. Terpikat sisi unik gamelan, membuatnya ingin mengerti secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahun1982 Ishida memutuskan menimba ilmu di Indonesia, negeri asal gamelan.

Surakarta, kota pusat kebudayaan Jawa, menjadi kota pertama yang dituju, sekaligus menjadi tempat tinggalnya hingga kini. Belakangan, Yogyakarta dilihat Ishida sebagai pusat budaya yang lain. Di kota gudeg inilah ia melakukan kegiatan akademisnya sebagai dosen Jurusan Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya, UGM dari tahun 1988 hingga sekarang.

Selain aktif mengajar, Ishida juga tetap aktif bermain gamelan. Selama tiga tahun terakhir, Ishida bergabung dengan komunitas penabuh gamelan di Yogyakarta. Mereka sering memainkan gamelan di kediaman Tjokrowarsito, sesepuh penabuh gamelan di Yogyakarta. Untuk menghormati Beliau, Ishida dan kawan-kawan menyelenggarakan uyon-uyon (hari peringatan kelahiran menurut kalender Jawa) setiap malam Jum'at Pon.

Genap 24 tahun sudah Ishida bergulat dengan budaya Jawa. Ia mengaku sebagai pemula tidak boleh merasa bosan dengan aktivitasnya itu. Lagipula, ia merasa tertantang untuk menyelami kebudayaan Jawa lebih dalam.

Sekian tahun menyelami gamelan membuatnya bersyukur. "Saya berterima kasih sekali kepada orang Jawa yang mengenalkan saya cara mengungkapkan kebahagiaan lewat gamelan," ujarnya. Bentuk ungkapan terima kasihnya dibuktikan lewat penelitian. Wanita kelahiran Shizuoka, 21 Juni 1957 ini berambisi membuat catatan tentang gamelan dari zaman dinasti Mataram sampai zaman sesudahnya. Pilihan penelitiannya jatuh pada kajian gamelan Serat Centhini. "Dalam Centhini banyak adegan yang diiringi gamelan dengan berbagai suasana," ungkap Ishida. "Saya ingin mengetahuinya," tambahnya kemudian.

Akan tetapi, wanita dengan postur tubuh mungil ini menyesalkan keadaan budaya Jawa yang mulai terkikis dan ditinggalkan masyarakatnya. "Saya suka gamelan, tetapi kalau orang Jawa sudah tidak suka, lantas gamelan punah, ya apa boleh buat," senyuman getir menghiasi wajahnya kala itu. Bagi Ishida, menyadari budaya yang terangkum dalam sejarah itu penting. Setidaknya untuk memberi pemahaman bahwa manusia tidak lahir begitu saja tetapi lahir di atas himpunan waktu dan kegiatan manusia (budaya) sebelumnya.**[Ifa]**

Dasalengkara Lena : Medan Pertarungan Asmara

ABDEE.BAL

PANGGUNG YANG SEMULA SEPI, MULAI TAMPAK ramai. Irama gamelan dan nyanyian para sinden mengalun merdu. Orang-orang pun mulai berkumpul di sekitar panggung. Malam itu, akan dipentaskan sebuah pagelaran tradisional wayang wong.

Salah satu rangkaian acara Bengawan Solo Festival (BSF) itu, berlangsung di Sriwedari Surakarta, Jumat (2/9). Pementasan itu dibawakan Unit Kesenian Mahasiswa Seni Wayang Gaya Yogyakarta Universitas Gadjah Mada (Swagayugama). Mereka menampilkan cerita Mahabarata dengan lakon Dasalengkara Lena, mengisahkan percintaan Raden Abimanyu dan Dewi Siti Sendari. Namun, indahnya cinta mereka telah terusik oleh datangnya lamaran Prabu Dasalengkara dari Negeri Singgela.

Di awal cerita, tampak dua rombongan dari Negeri Singgela dan Negeri Dwarawati keluar dari kanan kiri panggung. Gemerlapnya busana dan pernak-pernik yang dikenakan pemain seakan membuktikan kemegahan kehidupan keraton. Prabu Dasalengkara, raja Negeri Singgela mengutus Dewi Suprabawati dan Dewi Suradewati menyampaikan lamaran untuk putri kerajaan Dwarawati, Dewi Siti Sendari.

Sayangnya, lamaran itu disambut lain Prabu Kresna, raja Dwarawati. Dengan tidak meninggalkan kesan lembut dalam dirinya, gerakan tangan yang gemulai dan tutur bahasa santun, Prabu Kresna menolak lamaran tersebut. Lamaran itu tak diterima lantaran putrinya telah menikah dengan Raden Abimanyu, putra Raden Arjuna

Mendengar penolakan itu, Prabu Dasalengkara langsung naik pitam. Tokohnya yang menyeramkan, dengan tubuh besar, rambut panjang, dan jenggot lebat tidak bisa begitu saja menerima penolakan itu. Dia memutuskan untuk tetap merebut Dewi Siti Sendari, walau dengan pertempuran.

Alunan musik gamelan yang mengiringi sepanjang pertempuran mampu mempengaruhi luapan emosi tokoh-tokohnya. Semakin dahsyat mereka bertarung, makin keras dan cepat ritme gamelan yang dimainkan. Tendangan, pukulan, tangkisan, permainan keris dan panah dikemas apik melalui tarian yang gemulai, diiringi alunan gamelan. Semuanya disuguhkan tanpa mengurangi esensi dari sebuah pertarungan yang sengit.

Apalah artinya harga sebuah nyawa di hadapan cinta

Para petarung bersaing menunjukkan kelihaian masing-masing. Ketangkasan memanah Dewi Srikandi dari Negeri Dwarawati berhasil mengalahkan Dewi Suradewati. Di balik sengitnya pertarungan yang terjadi, terdapat konflik asmara antara Raden Arjuna dan Dewi Suprabawati. Tak kuasa menahan gejolak di hati, hingga tanpa sengaja Dewi Suprabawati menjatuhkan kerisnya. Konon, dalam cerita pewayangan, pusaka yang jatuh berarti petarung tersebut kalah. Akhirnya, Dewi Suprabawati menikah dengan Raden Arjuna. Klimaks dari pertarungan itu terjadi ketika Prabu Dasalengkara dan Raden Abimanyu muncul. Keduanya saling bersaing memperebutkan cinta. Nafsu Prabu Dasalengkara yang begitu besar membawa nyawanya di ujung kematian. Dengan tewasnya raja Singgela itu, menghantarkan Negeri Dwarawati ke puncak kemenangan. Memang, dalam sebuah persaingan harus ada yang menang dan kalah. Begitu pula dengan cinta, kadang mesti ada yang dikorbankan, tak terkecuali nyawa.**[Fikria]**

Nasionalisme Era Reformasi Dalam Kacamata Remaja

Era reformasi di Indonesia sejatinya dimaknai sebagai era perbaikan kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi riil yang terpampang jelas ialah adanya penyalahgunaan sehingga memunculkan krisis multi-dimensi. Eskalasi keterpurukan ini salah satunya dapat ditengarai lewat lemahnya upaya penegakan hukum.

SEPERTI YANG KITA KETAHUI, PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MASIH JAUH dari harapan. Hukum seringkali disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan dan kedudukan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Pemerintah Republik Indonesia (RI)—sebagai simbol identitas nasional—kurang tegas dalam memberikan perhatian penuh pada pengelolaan negara yang baik. Hal ini memicu skeptisisme di mata masyarakat, khususnya remaja sebagai generasi penerus bangsa. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka rasa nasionalisme dalam diri remaja akan meluntur.

Kinerja dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa utamanya dalam hal penegakan hukum secara adil akan mendapat penilaian dari masyarakat. Jika pemerintah dinilai berhasil dalam melaksanakan penegakan hukum, maka akan melahirkan citra positif dan memperlancar proses nation building sehingga rasa nasionalisme pun akan meningkat. Begitupun juga sebaliknya.

Permasalahan inilah yang coba diangkat oleh Anggraeni Kusumawardani, mahasiswa Psikologi dalam skripsinya yang berjudul "Hubungan Antara Nasionalisme Pada Remaja dengan Citra Penegakan Hukum Pemerintah Republik Indonesia Era Reformasi" di tahun 2003 silam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan disertai penafsiran data secara kualitatif. Sedangkan variabel-variabel yang dipergunakan yakni sikap nasionalisme sebagai variabel dependen dan citra penegakan hukum Pemerintah RI sebagai variabel independen. Sebanyak 201 responden terlibat dalam penelitian ini dengan kualifikasi: warga negara Indonesia, usia 15-19 tahun, berdomisili di Jabotabek, dan sedang menempuh pendidikan SMU.

Remaja dipilih sebagai subyek penelitian berdasarkan teori bahwa seseorang mempelajari nasionalisme pertama kalinya ketika usia remaja. Selain itu juga adanya anggapan kuat bahwa remaja sekarang ini mengalami erosi nasionalisme disebabkan adanya distorsi dalam proses transfer nilai-nilai kebangsaan diakibatkan rentangan yang demikian jauh antara generasi founding father terdahulu dengan generasi masa kini.

Pemilihan subyek dilakukan dengan menggunakan teknik *combinated sampling*. Sedangkan Jakarta Timur ditentukan sebagai *area sampling* dengan asumsi letak pusat pemerintahan RI yang berada di Jakarta serta berkembang pesatnya media informasi dibandingkan dengan daerah lain. Pemilihan sekolah sebagai sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Sedangkan teknik *random cluster* digunakan dalam pemilihan sampel di sekolah yang terpilih. Dan analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dari Pearson dengan bantuan fasilitas komputer SPSS versi 11.0 .

Dari hasil analisa data menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,327 dengan $p<0,01$. Artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap nasionalisme pada remaja dengan citra penegakan hukum di Indonesia. Sikap nasionalisme pada remaja dipengaruhi oleh citra penegakan hukum pemerintah RI sebesar 10,7%. Tingkat nasionalisme subyek berada pada kategori tinggi dan tingkat citra penegakan hukum pemerintah RI berada pada kategori sedang.

Nasionalisme sebagai konsep kebangsaan yang berfungsi memberi label identitas kebangsaan di tengah masyarakat dunia dan menjadi perekat kemajemukan dalam masyarakat merupakan potensi berharga yang harus dilestarikan keberadaannya. Diperlukan bukti konkret untuk mewujudkan harapan menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. **[Annisa]**
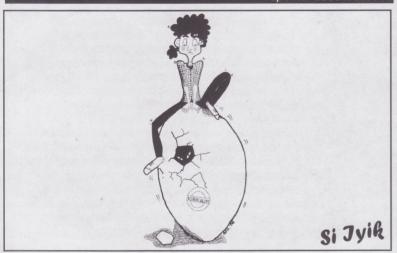
DITERBITKAN OLEH BPPM UGM BALAIRUNG Penanggungjawab: Nurhikmah **Koordinator:** Eka Saputra **Tim Kreatif:** Abdee, Ayudi, Ningsih, Tiwi **Editor:** Maharani, Intan, Ides, Ikhdah, Hano, Novi **Redaksi:** Wiwi, Novi, Adhif, Nora, Nuraini, Pandu, Ifa, Fikria, Ima **Riset:** Anisa **Perusahaan:** Agung, Arif, Bela, Dinar, Danang, Diani, Elly, Ika, Ismu, Tamimy, Teguh, Vera, Wining **Produksi:** Ade, Ipang, Irsyad
Cover : Abdee

ALAMAT REDAKSI, SIRKULASI, IKLAN DAN PROMOSI: BULAKSUMUR B21 Yogyakarta 55281, Fax: (0274) 566171 E-mail: balkon_ugm@yahoo.com CONTACT PERSON: Ningsih (081804190061) REKENING BCA YOGYAKARTA No. 0372355296 A.N. DIAN MENTARI A.
GRATIS DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PARKIR TP, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN DAN BULAKSUMUR B21.
Redaksi menerima tanggapan, kesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui alamat E-mail balkon_ugm@yahoo.com atau sms ke 08562870417,085225035743 atau juga dapat disampaikan langsung ke kantor Redaksi *Balairung* di Bulaksumur B21.

INTERUPSI !

Pasca (Lulus) Sarjana

"Apalah!" begitu ujar seorang kawan suatu ketika. Konteksnya adalah menjawab pertanyaan hendak melakukan apa setelah lulus studi di universitas. Sulit menerka makna di baliknya, entah pesimis atau optimis. Satu yang pasti, memikirkan masa depan selalu atau terkadang membuat manusia diselimuti kebingungan, padahal Bertrand Russel, filsuf Inggris, menuliskan prudensia sebagai pembeda manusia beradab dan primitf.

Prudensia dapat diterjemahkan sebagai sikap berwawasan ke depan, lebih luasnya sikap senantiasa penuh pertimbangan. Di tengah pergelutan keseharian, kita selaku mahasiswa semakin dihantui bayang-bayang masa depan. Pandangan umum mendesak diri sedemikian rupa segera dapat hidup mandiri. Mandiri dalam hematnya adalah mencari uang sendiri.

Tak heran jika kita yang selama ini biasa 'disusui' merasa ketar-ketir serasa menunggu eksekusi mati. Di kulminasi pasca kelulusan keberhasilan mahasiswa dinilai. Sanggupkah ia meneruskan strata kehidupan ke jenjang maha-manusia yang memijaki bumi dengan kaki sendiri.

Premis berwawasan ke depan mengandaikan kesimpulan perlunya persiapan. Tentu sudah jelas, sekaranglah waktu melakukan persiapan. Universitas harusnya dapat menjadi wadah mencari bekal yang diperlukan. Semacam 'kawah candradimuka' yang menempa manusia menyucikan diri. Wadah ini dapat dikatakan sebagai struktur dan kita (baca: mahasiswa), dengan meminjam istilah Bourdieu, adalah agen. Wacana kontemporer mengembangkan agen, lagi-lagi, sebagai unsur mandiri. Jangan sampai larut terbentuk struktur.

Kemudian, wajar bila mahasiswa dituntut tidak serta merta 'membebek' universitas. Mahasiswa, sebagai agen aktif, berpotensi menyuarakan kepentingan terkait kebijakan yang diampu struktur universitas. Termasuk pada kasus perubahan kurikulum. Penyesuaian tema keilmuan dengan perkembangan kenyataan memang diperlukan, namun patut diingat manusia beradab selalu penuh pertimbangan.

Ritual perubahan kurikulum pendidikan tak bisa diamini begitu saja. Pendidikan merupakan aras fundamental dalam menopang kemajuan peradaban bangsa. Jika asumsi dasar memperbaiki kualitas pendidikan, maka pertanyaannya: mampukah perubahan kurikulum mewujudkannya? Atau lebih pragmatis: mampukah membuat mahasiswa, terutama kawan tadi, menjawab pertanyaan tentang masa depan? Menyambung ujaran sebelumnya, penulis jadi teringat celetukan kawan lain, "Kalau lulus nanti, aku mau buka peternakan buaya, *biar* nanti orang-orang dengan pertanyaan macam kamu *tak umpanin* ke dalamnya."

Penginterupsi

SUDUT

* Kurikulum pendidikan UGM berubah
\- Kualitas juga harus berubah (lebih baik) dong!

* Yah, Gelex bubaran...
\- Balairung masih buka pendaftaran lho!

Pendidikan Kejuruan, Menanti Pengakuan

STIGMA MASYARAKAT SERING KALI MEMBENTUK POLA pikir yang represif. Keberadaan sekolah bagi kebanyakan orang dinilai sebagai mitos intelektual yang terlembaga. Masyarakat memberikan penilaian lebih bagi orang-orang yang memiliki gelar pendidikan tinggi. Pendidikan yang merupakan hak beranjak menjadi sebuah kewajiban. Pendidikan yang seharusnya menjadi pelayanan masyarakat beralih fungsi menjadi tanggung jawab yang harus diemban. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kewibawaan tersendiri di mata masyarakat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari lembaga pendidikan tidak merasakan kewibawaan seperti halnya Sekolah Menengah Umum (SMU). Adanya sistem pendidikan yang hierarkis mewajibkan pendaftar perguruan tinggi harus lulus sekolah menengah sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan pemerintah tersebut menjadikan SMU dipandang lebih bergengsi. Sehingga secara tidak sadar telah tercipta cara-cara untuk memperebutkan bangku SMU. Alhasil, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ditolak di SMU terpaksa memilih SMK. Maka, SMK bukan sebagai prioritas, disebabkan tidak adanya pilihan lain.

Seluk beluk pendidikan kejuruan yang termarjinalkan tersebut diangkat dalam diskusi mingguan Balairung pada Jumat (8/9), di Bulaksumur B-21. Dalam makalahnya, Nurjannah Intan DP selaku pembicara memaparkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia menyoroti dua hal. Pertama, jenis program diklat dikembangkan atas dasar tuntutan kebutuhan dunia kerja (market driven). Kedua, program pembelajaran yang dikembangkan harus mengacu pada pencapaian berbasis kompetensi (competency based training).

Kurikulum SMK lebih memprioritaskan sistem pembelajaran pada kebutuhan dunia kerja. Materi yang diberikan terkonsentrasi pada cara menghasilkan produk berkualitas, bukan cara memasarkannya. Sedangkan, pengembangan materi berbasis kompetensi dikesampingkan. Akibatnya, lulusan SMK hanya menjadi tenaga kerja, bukan pencipta lapangan kerja.

Berbagai tanggapan mewarnai diskusi tersebut. Salah satu peserta diskusi mengungkapkan, pendidikan kejuruan di Indonesia seolah-olah dibuat oleh golongan tertentu untuk mencari tenaga kerja murah. Kini, esensi sekolah tidak lagi untuk mencari ilmu namun lebih berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan lain muncul ketika pemerintah pun seakan menomorduakan pendidikan kejuruan. Pemberian fasilitas yang tidak memadai di banyak SMK menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan kejuruan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Bab XI tentang Pembiayaan, khususnya Pasal 29 Ayat 2. Pasal ini menyebutkan,
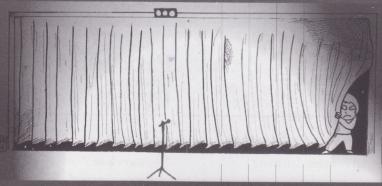
untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja, dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.

SMK dituntut mampu mengelola unit produksinya secara mandiri sesuai dengan PP jika tidak ingin dipandang sebelah mata. Pengelolaan tersebut terfokus pada cara menghasilkan barang berkualitas dan layak jual. Sedangkan, materi pemasaran produk maupun manajemen usaha kurang mendapat perhatian.

Beranjak malam, lontaran peserta semakin mengerucut. Stigma masyarakat yang mempengaruhi pandangan orang tua mengenai pendidikan kejuruan harus segera dibenahi. Pembenahan dapat dimulai dari keluarga sebagai elemen terkecil yang berperan membentuk pola pikir.

Demikian pula dengan kurikulum yang digunakan di SMK. Sudah saatnya siswa SMK tidak hanya diberi materi-materi teknis untuk mengembangkan keahlian khusus. Namun, teori-teori yang berkaitan dengan keilmuan juga perlu diberikan untuk mengembangkan pola pikir.

Perubahan selalu membutuhkan usaha yang besar. Begitu pula dengan pendidikan kejuruan di negara ini. Proses dan waktu akan menjadi saksi dari usaha perubahan itu.**[Ima]**

Redaksi menerima tulisan SIASAT, opini mahasiswa seputar kampus. Tulisan maksimal 3500 karakter, dapat dikirim ke balkon_ugm@yahoo.com atau langsung ke Redaksi Balairung di Bulaksumur B-21.

Edisi 90, 25 SEPTEMBER 2006

Memberi Panduan Menuju Perubahan